

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan mengenai teori-teori yang ditemukan dalam literatur untuk menjelaskan mengenai masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan literatur berfungsi sebagai landasan teori yang akan digunakan dalam proses analisis data.

#### **2.1 Perpustakaan Parlemen (National Diet Library/NDL)**

Dalam situs resmi Perpustakaan National Jepang ([www.ndl.go.jp](http://www.ndl.go.jp)) disebutkan bahwa perpustakaan parlemen Jepang (National Diet Library/ NDL) adalah perpustakaan yang memberi layanan pada parlemen Jepang, lembaga eksekutif dan masyarakat umum di Jepang. Perpustakaan ini berfungsi sebagai perpustakaan yang membantu parlemen dalam membuat undang-undang sekaligus sebagai perpustakaan nasional (perpustakaan deposit) yang mengumpulkan semua terbitan dan karya yang terbit di Jepang.

Pada mulanya NDL didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan informasi bagi anggota parlemen dan eksekutif dalam menjalankan tugasnya di mana perpustakaan ini juga dimaksudkan untuk menjadi perpustakaan utama bagi seluruh lembaga pemerintahan di Jepang. Dalam perkembangannya, akhirnya NDL berkembang menjadi perpustakaan nasional yang berfungsi untuk mengumpulkan segala jenis terbitan yang terbit di Jepang baik buku, film, lagu, atau pun karya seni lainnya (Clap, 1948).

Sebagai perpustakaan nasional, NDL diharapkan dapat menyediakan akses dan koleksi serta informasi terkini kepada penggunanya. Koleksi yang ada di NDL ditempatkan di beberapa bagian terpisah yaitu di Tokyo, Kansai, dan Perpustakaan Internasional Bacaan Anak. Hal ini dikarenakan jumlah koleksi yang

sangat besar dan semakin terbatasnya ruang. NDL mengadopsi model seperti Library of Congress di Amerika Serikat sebagai contoh.

Pengertian mengenai NDL diperlukan untuk menajamkan pemahaman tentang perpustakaan dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” yang ternyata merupakan semacam perpustakaan parlemen atau perpustakaan Diet dan bukan hanya merupakan perpustakaan umum semata.

## 2.2 Kebebasan intelektual di perpustakaan

Kebebasan intelektual menurut deklarasi hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 19 yang adalah:

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”*

Artinya:

“Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pendapat dan ekspresi mereka dengan bebas; kebebasan tersebut termasuk kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tanpa larangan dan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan gagasan lewat media tanpa batas.”

Sementara itu, kebebasan intelektual menurut Michigan Library Association atau MLA (2003:2), kebebasan intelektual adalah kebebasan untuk berfikir (*thought*); kebebasan untuk meyakini/ kepercayaan (*believe*); kebebasan untuk membaca (*read*); dan kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide kita (*express our ideas*). Sedangkan menurut Frank P. Iacono (2006:45), kebebasan intelektual adalah sebuah frase dalam mengekspresikan konsep-konsep dari keragaman pikiran, gagasan dan informasi.

Konsep mengenai kebebasan intelektual di perpustakaan telah dituangkan secara tertulis oleh International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) melalui FAIFE (*Free Access to Information and Freedom of Expression*). IFLA/FAIFE merupakan lembaga internasional yang berfungsi mendukung dan mempromosikan kebebasan intelektual khususnya di perpustakaan seperti yang telah disepakati dalam deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB.

Menurut IFLA/FAIFE, setiap orang memiliki hak mendasar untuk mengakses informasi dan pengetahuan, juga mengekspresikan pandangan serta intelektualitas mereka. IFLA/FAIFE juga mengatakan bahwa komitmen terhadap kebebasan intelektual merupakan kewajiban mendasar bagi perpustakaan dan profesi informasi. Perpustakaan dan stafnya harus memahami mengenai prinsip-prinsip kebebasan intelektual, termasuk akses kepada informasi dan kebebasan berekspresi serta mengenali privasi pengguna perpustakaan. Prinsip-prinsip kebebasan intelektual tersebut adalah:

- Perpustakaan menyediakan akses kepada informasi, gagasan dan karya lainnya. Perpustakaan berfungsi sebagai garda pengetahuan, pemikiran, dan budaya.
- Perpustakaan memberikan dukungan yang besar kepada pembelajaran seumur hidup, pembuatan keputusan yang mandiri, dan perkembangan kebudayaan.
- Perpustakaan berkontribusi dalam perkembangan dan pemeliharaan terhadap kebebasan intelektual dan membantu menjaga nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia.
- Perpustakaan memiliki tanggung jawab dalam menjamin dan memfasilitasi akses ke pengetahuan dan kegiatan intelektual lainnya.

- Perpustakaan harus meyakini bahwa seleksi terhadap bahan pustaka di perpustakaan telah dilaksanakan dengan arahan dan pertimbangan profesional dan bukan berdasarkan pandangan politis, moral, atau keagamaan tertentu.
- Perpustakaan seyogyanya mengadakan, mengelola dan menyebarkan informasi dengan bebas dan menentang segala bentuk sensor.
- Perpustakaan harus membuat segala bentuk informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap pengguna tanpa adanya diskriminasi ras, keyakinan, gender, usia atau alasan lainnya.
- Pengguna perpustakaan memiliki hak terhadap privasinya pribadi.
- Masyarakat memiliki akses kepada koleksi perpustakaan dengan menjunjung prinsip-prinsip kebebasan intelektual.

Barbara Turfan (1995:21) menggarisbawahi bahwa kebebasan intelektual terdiri dari dua aspek yaitu bebas mengakses informasi dan bebas berekspresi.

Chartered Institute of Library and Information Professional atau CILIP (1995) menyatakan bahwa peran perpustakaan dan layanan informasi adalah untuk menyediakan sumber-sumber informasi dan juga menyediakan akses informasi tersebut untuk masyarakat dalam media apapun dan bentuk apapun.

Pada tahun 1939, ALA telah menetapkan *The Library Bill of Rights* (1948, amandemen 1961, 1967, dan 1980) yang secara garis besar mendukung kebebasan intelektual di perpustakaan. *The Library Bill of Rights* terdiri dari:

- Buku dan sumber informasi lainnya harus disediakan demi kepentingan penyediaan informasi dan pencerahan bagi pengguna informasi. Bahan pustaka seharusnya tidak dikeluarkan dari koleksi karena perbedaan latar belakang, pandangan, ataupun suku bangsa. Perpustakaan sebaiknya

menyediakan segala jenis informasi yang mewakili segala jenis sudut pandang.

- Perpustakaan menentang bentuk sensor dalam pemenuhan kewajiban perpustakaan terhadap penyediaan informasi.
- Perpustakaan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan sama terhadap kebebasan berekspresi.
- Hak seseorang untuk mengakses informasi di perpustakaan tidak boleh dihalangi karena alasan tertentu.
- Perpustakaan menyediakan tempat dan ruangan publik bagi setiap pengguna yang mereka layani.

Kebebasan intelektual di perpustakaan berkaitan dengan dasar-dasar demokrasi yang ada di perpustakaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Russel Bowden dalam Turfan (1995:38) yang secara eksplisit menyatakan bahwa demokrasi membutuhkan informasi untuk menopang dan membantu perkembangan dari demokrasi itu sendiri, begitu pula sebaliknya.

Menurut Byrne (2003) kebebasan intelektual adalah sebuah hak asasi mendasar yang dimiliki oleh manusia, tanpa adanya kebebasan untuk berpikir, berekspresi dan mengemukakan ide serta gagasan yang dimiliki seseorang, maka demokrasi tidak akan terwujud.

Byrne juga menambahkan bahwa paradigma demokrasi di perpustakaan menempatkan perpustakaan sebagai suatu institusi yang mengajarkan kehidupan berdemokrasi, yaitu dengan melihat nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya seperti menerapkan prinsip terbuka untuk siapa saja dan juga dirancang untuk mengakomodasi keragaman ide dan pandangan demi mencapai universalitas.

Sementara itu Standar Perpustakaan Umum IFLA tahun 1973 dalam Turfan (1995) menyatakan bahwa perpustakaan adalah representasi praktis dari demokrasi dalam pendidikan formal maupun pendidikan seumur hidup.

Kebebasan intelektual di perpustakaan menunjukkan sistem demokrasi yang berlangsung dengan baik di perpustakaan di mana perpustakaan menjunjung tinggi hak setiap individu di perpustakaan untuk mengakses informasi dan berekspresi tanpa adanya larangan ataupun batasan dan diskriminasi ras, gender, usia, dan lain-lain.

### 2.3 Sensor

Kebebasan intelektual di perpustakaan tidak selalu tanpa hambatan. Hambatan yang terjadi terhadap kebebasan intelektual salah satunya adalah hambatan berbentuk sensor.

Ann Curry (1997) seperti yang dikutip oleh Moody dalam “Covert Censorship in Libraries: a Discussion Paper” (2005:139) mengatakan bahwasanya sensor seperti halnya sebuah aplikasi praktis, yang berubah setiap waktu bergantung pada masyarakat yang menjalankannya. Sensor mengarah pada tindakan yang berfungsi untuk menghalangi akses terhadap informasi.

Sementara itu, sensor menurut ALA (2008) adalah sebuah tekanan dan halangan terhadap ide/ gagasan dan informasi di mana ada pihak tertentu seperti pemerintah, individu, maupun kelompok lainnya yang merasa informasi tersebut membahayakan. Sensor terjadi ketika bahan pustaka seperti buku, majalah, film dan video, atau karya seni lainnya dipindahkan atau dijauhkan dari akses publik. Sensor juga terjadi ketika informasi tidak diperkenankan untuk kelompok pengguna tertentu misalnya kelompok umur tertentu atau karakteristik lainnya.

Moody (2005:139) mengemukakan bahwa biasanya buku yang disensor adalah buku dengan topik kontroversial seperti masalah homoseksual atau lesbian, agama fundamental, pandangan politik yang ekstrim, pornografi serta rasisme.

ALA (2008) berpendapat bahwa di kebanyakan lembaga, sensor timbul karena pandangan pihak tertentu yang menganggap sensor dapat meningkatkan

kemasyarakatan, melindungi anak-anak, dan menyimpan apa yang dianggap sensor sebagai masalah moral terakhir yang tersisa.

Japan Library Association (JLA) menyatakan pandangannya mengenai kebebasan intelektual di perpustakaan dalam Konferensi JLA pada 30 Mei 1979, seperti yang dicantumkan dalam *website* resmi IFLA/FAIFE, yaitu:

1. Kekuasaan konstitusi Jepang terletak di tangan rakyat, maka dari itu Jepang menjamin kebebasan setiap warganya untuk mengekspresikan gagasan dan opini mereka.
2. Setiap warga negara berhak memperoleh akses bebas kepada bahan atau material apapun. Maka dari itu, perpustakaan sebagai sebuah institusi harus dapat memenuhi fungsi tersebut.
3. Perpustakaan seyogyanya dapat membuat semua bahan pustaka yang ada di dalamnya dapat diakses oleh setiap orang terlepas dari tekanan politik dan sosial.
4. Perpustakaan mampu bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memperluas hak untuk memperoleh informasi bagi masyarakat.
5. Setiap orang sama kedudukannya di dalam perpustakaan. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun di perpustakaan, baik diskriminasi ras, keyakinan, jenis kelamin, atau jenis diskriminasi lainnya.
6. Prinsip-prinsip kebebasan intelektual harus diemban dan dilaksanakan di setiap jenis perpustakaan.

#### **2.4 Serial animasi Jepang**

Beaver (1994:309) menyebutkan bahwa serial merupakan sejenis gambar bergerak yang ditayangkan secara bertahap melalui episode-episode yang biasanya dipersembahkan dalam periode beberapa minggu.

Sedangkan animasi menurut Beaver (1994:19) adalah sejenis film di mana film digambar dan disajikan dalam bentuk *frame by frame*. Biasanya setiap *frame* berbeda dari *frame* yang sebelumnya sehingga memberikan sebuah ilustrasi gerak tertentu ketika *frame* tersebut digerakkan dengan cepat. Istilah animasi dalam perkembangannya juga disebut animasi komputer, kartun, dan *anime* (animasi Jepang).

Susan J. Napier (2001) menyatakan pandangannya bahwa animasi Jepang (*anime*) dewasa ini telah menjadi fenomena tersendiri dalam kebudayaan populer baik di Jepang maupun di negara lain. Animasi Jepang mulai dibuat pada tahun 1915, namun berkembang menjadi sebuah sajian layar kaca pada dekade tahun 1990-an. Di Jepang, animasi berpengaruh dalam bidang pendidikan maupun gaya hidup. Animasi Jepang menjadi cermin bagi keadaan masyarakat Jepang pada umumnya melalui berbagai sudut pandang yang ada di dalamnya seperti isu-isu khusus dan bahkan mimpi-mimpi masyarakat Jepang. Animasi di Jepang berangsur-angsur menjadi sebuah identitas tersendiri dalam konteks sosial dan budaya Jepang serta dunia global.

Animasi menawarkan keanekaragaman yang cukup ekstrim dari sebuah representasi kebudayaan. Animasi telah menjadi alternatif dari sebuah representasi tertentu yang berbeda dari representasi pada film *live action* pada umumnya (Annalee Witz dalam Napier, 2001: 11).

## **2.5 “Toshokan Sensō (Library War)”**

“Toshokan Sensō (Library War)” pada mulanya adalah sebuah serial novel yang dibuat oleh Hiro Arikawa dengan ilustrasi oleh Sukumo Adabana. Serial novel tersebut kemudian diangkat ke layar kaca oleh perusahaan *Production I.G* melalui Media Works dan juga kerjasama dengan Asosiasi Perpustakaan Jepang (Japan Library Association). Serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)”

versi layar kaca disutradarai oleh Takayuki Hamana. Serial animasi tersebut diputar secara primer di Jepang pada 11 April 2008 oleh Fuji TV Noitamina<sup>5</sup>.

Serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” dilatarbelakangi oleh Pernyataan atas Kebebasan Intelektual di Perpustakaan (*Statement on Intellectual Freedom in Libraries*) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1954 (amandemen 1979). Namun dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” pernyataan tersebut disamakan istilahnya menjadi Hukum Kebebasan Perpustakaan (*Freedom of the Library Law*) yang berisi poin-poin berikut:

“....

1. Perpustakaan memiliki hak dan kebebasan untuk mengumpulkan dan mengoleksi semua jenis bahan pustaka.
2. Perpustakaan memiliki hak dan kebebasan dalam menyediakan bahan pustaka bagi pengguna.
3. Perpustakaan menjamin hak pribadi dan privasi pengguna
4. Perpustakaan menentang segala jenis sensor yang tidak sesuai.
5. Ketika hak dan kebebasan perpustakaan dirampas dan dilanggar, maka pustakawan akan bekerjasama dan mencurahkan diri untuk mempertahankan kebebasan itu.

....”

---

<sup>5</sup> Wikipedia. [http://en.wikipedia.org/wiki/Library\\_War](http://en.wikipedia.org/wiki/Library_War)

### 2.5.1 Sinopsis

Cerita berawal dari keterlibatan pemerintah Jepang atas dikeluarkannya sebuah undang-undang yang disebut *Media Betterment Act* (MBA) pada tahun 1989 yang berisi tentang kebijakan sensor terhadap segala jenis media yang disinyalir dapat membahayakan masyarakat dan pemerintah Jepang. Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah Jepang merekrut sebuah agen militer yang disebut dengan *Media Betterment Committee* (MBC) yang diberi mandat untuk mencari pihak-pihak tertentu baik individu maupun kelompok dan organisasi yang melakukan kegiatan di media berdasarkan dalil kebebasan berekspresi (*freedom of expression*).

Perpustakaan menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Maka dari itu, perpustakaan juga membentuk suatu kesatuan militer yang disebut dengan *Library Defence Force* (LDF) yang bersifat anti-MBA yang bertugas untuk melindungi perpustakaan dari kemungkinan penyerbuan yang dilakukan oleh MBC. Hal tersebut dilakukan oleh perpustakaan berdasarkan Hukum Kebebasan Perpustakaan (*Freedom of the Library Law*). Konflik yang terjadi antara LDF dan MBC berlangsung hingga tahun 2019. Dalam skema kalender Jepang, tahun 1989 di dalam serial “Toshokan Sensō (Library War)” sama dengan tahun pertama pada era Seika yang berarti tahun 2019 adalah era Seika 31. Era Seika adalah sebuah era rekaan dan tidak ada di Jepang.

Serial “Toshokan Sensō (Library War)” berkisah tentang kehidupan Kasahara Iku, seorang pustakawan yang baru bergabung dengan perpustakaan Kantō pada tahun 2019 setelah terinspirasi oleh salah satu anggota Kantō LDF yang menyelamatkan buku yang diinginkan oleh Iku dari target sensor.

Setelah bergabung dengan perpustakaan Kantō, Kasahara Iku pun masuk ke dalam divisi *Library Task Force*, sebuah kelompok prajurit elit yang dilatih untuk menghadapi operasi sulit dalam tujuannya menegakkan kebebasan intelektual dan menentang sensor.

Selama bergabung di LDF, Kasahara Iku telah dilatih dan disumpah untuk melindungi buku dan setiap informasi yang ada di perpustakaan dari ancaman sensor oleh pemerintah dan MBC. Kontak fisik LDF dan MBC sering terjadi baik secara tertutup ataupun terbuka. Puncaknya adalah ketika LDF berjuang untuk melindungi sebuah seni patung yang bernilai tinggi yang melambangkan kebebasan berekspresi di perpustakaan, namun justru seni patung itulah yang menjadi target penyensoran.

### **2.5.2 Perpustakaan dalam “Toshokan Sensō (Library War)”**

Dalam budaya masyarakat Jepang, perpustakaan adalah salah satu unsur yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Perpustakaan seolah-olah telah menjadi bagian hidup masyarakat Jepang pada umumnya sehingga tidaklah mengherankan jika terdapat bentuk karya seperti film maupun novel dan komik yang mengangkat tema perpustakaan sebagai tema utama dan bukan hanya sebagai bagian latar cerita.

“Toshokan Sensō (Library War)” adalah salah satu karya dalam bentuk film fiksi ilmiah yang mengangkat tema perpustakaan secara lengkap dan utuh, baik dari segi koleksi maupun kepastakawanan yang ada di dalamnya. “Toshokan Sensō (Library War)” merupakan bentuk kerjasama Japan Library Association (JLA) dengan Hiro Arikawa sebagai penulis cerita. Tujuan pembuatan “Toshokan Sensō (Library War)” adalah guna memperkenalkan secara lebih luas lagi kepada masyarakat umum mengenai dunia perpustakaan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

Dalam alur cerita “Toshokan Sensō (Library War)”, perpustakaan yang dijadikan profil utama adalah perpustakaan Diet (NDL) yang merupakan perpustakaan parlemen sekaligus perpustakaan nasional. Maksud dari penggunaan perpustakaan Diet sebagai profil perpustakaan dalam “Toshokan Sensō (Library War)” adalah guna menunjukkan adanya universalitas seperti peran perpustakaan Diet itu sendiri yang tidak hanya memiliki fungsi perpustakaan di dalam satu

wilayah regional saja, namun juga tidak terbatas yang artinya bersifat lintas regional. Hal tersebut sama halnya dengan pemilihan media film pada “Toshokan Sensō (Library War)” yang bersifat universal yang dapat dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja tanpa ada batas wilayah dan negara sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dinikmati secara umum.

Perpustakaan seperti yang digambarkan dalam “Toshokan Sensō (Library War)” adalah sebuah badan yang telah berdiri sendiri yang terlepas dari campur tangan pemerintah sehingga perpustakaan dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan sendiri. Hal tersebut tercermin dari Peraturan Kebebasan perpustakaan (*Library Freedom Act*) yang tertuang dalam Hukum Kebebasan perpustakaan (*Freedom of the Library Law*) dalam “Toshokan Sensō (Library War)”.

Dalam kenyataannya, perpustakaan Diet di Jepang (NDL) adalah jenis perpustakaan parlemen yang juga memiliki hak tersendiri dalam menjalankan kebijakannya, namun masih dapat sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang itu sendiri.

### **2.5.3 Unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam “Toshokan Sensō (Library War)”**

“Toshokan Sensō (Library War)” adalah sebuah karya yang diangkat ke dalam bentuk serial animasi setelah sebelumnya diperkenalkan dalam bentuk komik di Jepang. Sebagai salah satu bentuk karya cerita fiksi ilmiah, tentu saja serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” juga memiliki unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik yang melingkupinya. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam serial animasi itu sendiri seperti penokohan (karakterisasi), alur (*plot*) serta latar (*setting*). Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur atau aspek yang dicakupi oleh serial animasi film atau serial animasi itu sendiri.

## Unsur Intrinsik

### 1. Penokohan

Tokoh-tokoh yang ada dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” merupakan tokoh rekaan yang tidak diperankan secara nyata oleh seorang aktor dan aktris, namun merupakan tokoh animasi yang berupa hasil gambar animasi komputer. Penokohan dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” merupakan ikon dari kenyataan yang mungkin diwakilinya.

#### a. Kasahara Iku (pengisi suara: Marina Inoue)

Kasahara Iku merupakan salah satu tokoh utama dari serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)”. Digambarkan bahwa Iku adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang merupakan salah satu pustakawan yang baru bergabung dengan perpustakaan Kantō. Kemudian Iku direkrut untuk bergabung dengan kesatuan LDF karena kemampuannya dan minat serta semangatnya untuk dapat selalu melindungi buku serta koleksi dan hak kebebasan intelektual pengguna lainnya.

Sebenarnya awal mula bergabungnya Iku dengan perpustakaan Kantō adalah karena terinspirasi oleh seorang pustakawan yang sebelumnya pernah menyelamatkan buku dongeng yang hendak dibeli Iku dari target sensor pasukan MBC. Semenjak itu, Iku menjadi sangat bersemangat untuk dapat selalu melindungi hak kebebasan berekspresi dan juga bersumpah untuk selalu melindungi buku dan koleksi perpustakaan dari target penyensoran.

#### b. Atsushi Dojou (pengisi suara: Tomoaki Maeno)

Atsushi Dojou adalah seorang pustakawan di perpustakaan Kantō. Ia juga merupakan anggota LDF dengan pangkat Letnan. Sebagai seorang Letnan di kesatuan LDF, Dojou bertanggung jawab pada misi-misi penyelamatan buku dan koleksi yang menjadi target penyensoran oleh pemerintah dan MBC.

#### c. Mikihisa Komaki (pengisi suara: Akira Ishida)

Mikihisa Komaki, merupakan salah satu instruktur dalam LDF yang juga merupakan letnan kedua di kesatuan tersebut.

d. Hikaru Tezuka (pengisi suara: Tatsuhisa Suzuki)

Hikaru Tezuka adalah salah satu pustakawan yang baru bergabung dengan perpustakaan Kantō. Selain itu ia juga merupakan salah satu anggota baru yang direkrut untuk masuk ke dalam LDF. Tezuka sangat menonjol dalam bidang pengetahuan mengenai perpustakaan dan juga tugas dasar pustakawan lainnya.

e. Asako Shibasaki (pengisi suara: Miyuki Sawashiro)

Asako Shibasaki adalah seorang pustakawan yang baru bergabung dengan perpustakaan Kantō. Di perpustakaan, Shibasaki bergabung dalam divisi intelijen militer yang bertugas untuk mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun pelanggaran kebijakan atas kebebasan intelektual perpustakaan maupun kebijakan sensor.

f. Kazuichi Inamine (pengisi suara: Haruo Sato)

Kazuichi Inamine adalah kepala perpustakaan Kantō yang juga merupakan komandan tertinggi LDF. Inamine merupakan tokoh sentral di balik pembentukan LDF dan pengadopsian sistem militer di perpustakaan. Hal yang melatarbelakangi pembentukan LDF itu sendiri adalah karena pengalaman kontak langsung Inamine dengan pasukan MBC pada tahun pertama penerapan kebijakan sensor oleh pemerintah di Hino, Tokyo.

## 2. Latar (*Setting*)

Serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” mengambil latar di negara Jepang tepatnya di Tokyo yaitu di sekitar perpustakaan Kantō dan juga beberapa toko buku di pusat kota yang merupakan target razia pasukan MBC.

Latar waktunya pun beragam yakni dimulai pada tahun 1 Seika (rezim rekaan pada serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” hingga tahun 31 Seika yang di dalam cerita “Toshokan Sensō (Library War)” merupakan tahun 2019 Masehi.

### 3. Plot

Alur cerita yang digunakan dalam serial animasi ini adalah alur maju-mundur. Alur mundur digunakan ketika *flashback* tragedi Hino yang mengingatkan kembali mengenai konflik yang terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan sensor oleh pemerintah dan MBC. Alur mundur juga digunakan ketika narator menyampaikan pengenalan kebijakan sensor oleh pemerintah dan juga kebijakan kebebasan intelektual oleh perpustakaan.

Sementara itu, alur maju digunakan ketika peristiwa demi peristiwa terjadi sepanjang perjalanan perpustakaan dan LDF dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebebasan intelektual dan menentang penyensoran.

### 4. Suasana

Kondisi atau suasana yang terjadi cukup bervariasi dan bersifat klimaks. Suasana yang terbentuk secara bergantian memberikan kesan tersendiri yang dimulai dengan kesan menegangkan ketika terjadi peperangan dan kontak fisik oleh LDF dalam menentang sensor dan melindungi buku.

### 5. Audio

Unsur audio yang digunakan dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” secara keseluruhan menggunakan audio *digital* karena serial ini merupakan serial animasi yang dibuat menggunakan teknologi *digital* komputer.

### Unsur Ekstrinsik

Unsur ekstrinsik dalam serial animasi ini adalah mengenai budaya yang melingkupinya yaitu mengenai budaya membaca yang sudah mengakar di masyarakat Jepang dan juga mengenai budaya militer yang juga sudah menjadi salah satu budaya masyarakat Jepang.

Adanya budaya membaca yang terdapat dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” dapat terlihat dari gambaran antusiasme pengguna

perpustakaan yang datang ke perpustakaan untuk menggunakan dan membaca koleksi perpustakaan dengan kesadaran sendiri. Budaya membaca masyarakat Jepang tersebut juga direpresentasikan dengan adanya perpustakaan umum yang banyak berdiri di Jepang.

Sementara itu, adanya pengaruh budaya militer yang terdapat dalam serial animasi “Toshokan Sensō (Library War)” ini digambarkan dengan jelas yaitu dari penggunaan istilah militer dan bahkan adegan serta jalan cerita pada serial animasi ini. Hal tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk inovasi serta kreasi ide cerita saja, namun juga dapat dipandang sebagai bentuk pengaruh budaya militer yang cukup kental mengakar pada masyarakat Jepang yang seolah-olah telah menjelma dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang itu sendiri yang tercermin dalam sikap maupun mental.

Kebudayaan militer di Jepang tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemiliteran di Jepang yang sudah terbentuk sejak zaman kekaisaran Jepang dengan filosofi dan tradisi militer Jepang yaitu *Bushido (the way of the warrior* atau *the code of conduct of the warrior)*. Filosofi atau nilai-nilai tersebut telah menjadi warisan sistem feodal Jepang kepada masyarakat pada umumnya.